

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Negara Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan, Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal oleh konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, yang secara eksplisit mengamanatkan tugas pokok Negara adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal ini berarti, pemerintah harus menjamin hak asasi setiap warganya untuk memiliki kehidupan yang layak. Pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat.

Didalam pembangunan Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan dapat terjadi karena salah satu faktor seperti Pemerintah lebih aktif didalam membangun wilayah perkotaan dan di daerah hanya beberapa

yang tersentuh di dalam pembangunan. Dengan adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat baik yang ada di kota maupun di daerah.

Daerah yang relatif kaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah yang penduduknya relatif miskin. Akibatnya ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota yang relatif kaya dengan yang relatif lebih miskin menjadi semakin besar. Tingkat kemiskinan yang masih lebih tinggi terjadi pada sektor-sektor seperti pertanian, karena pada sektor manufaktur dan jasa jauh lebih tinggi tumbuh melampaui sektor pertanian di sejumlah kota besar di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi dan berpenduduk beraneka ragam etnik dan budaya. Dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa menjadikan Indonesia menjadi Negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Hal tersebut membuat masing-masing wilayah memiliki strategi pembangunan dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam periode yang relatif singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada konsekuensi negatif yang dapat muncul sebagai akibat jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu yang dilakukan dengan cara menjalankan sentralisasi pemerintahan atau pemerintahan yang terpusat sehingga pusat pembangunan ekonomi nasional dan daerah

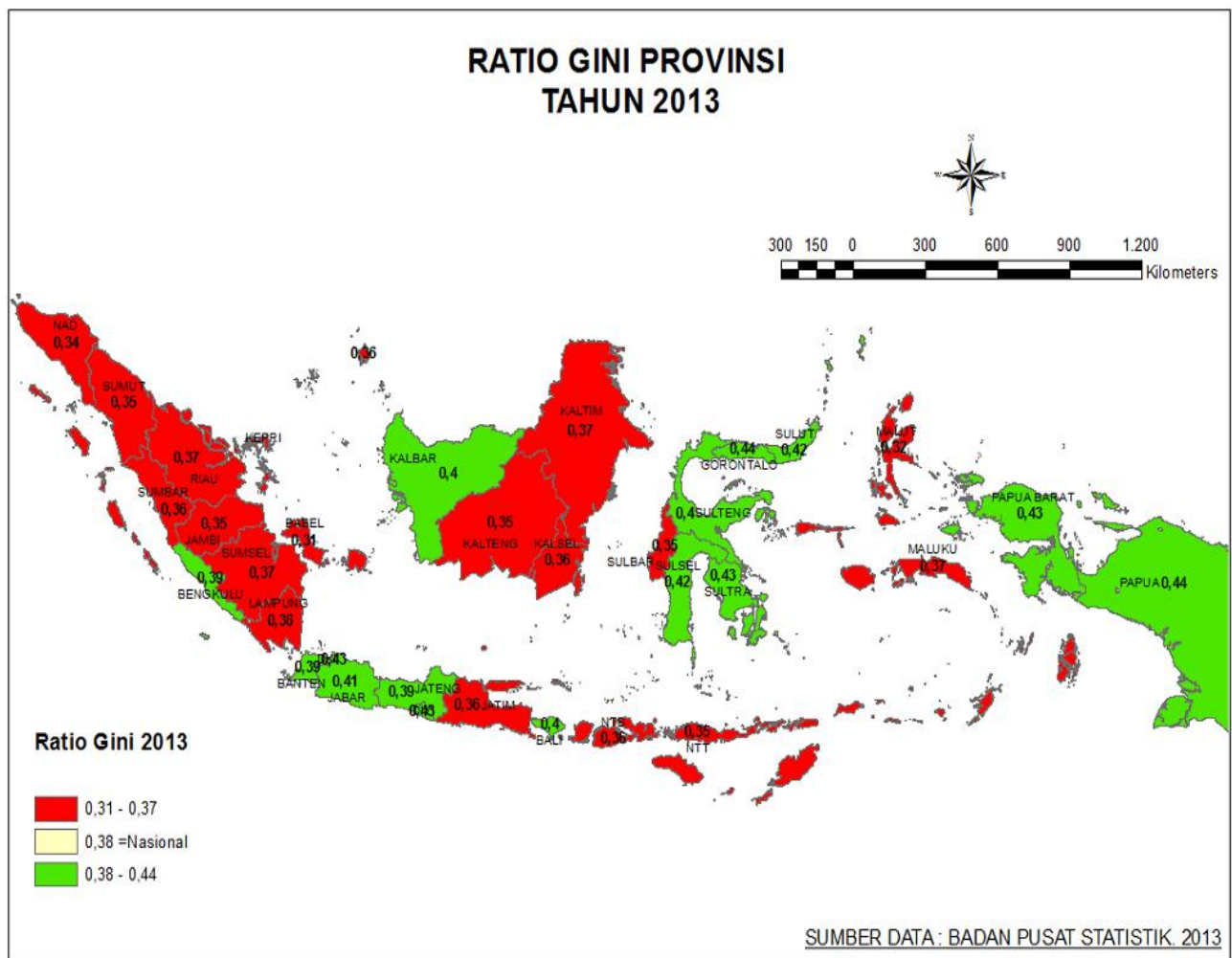
dimulai pada wilayah-wilayah yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai. Akibat dari sentralisasi ini adalah semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pusat. Sementara hasil-hasil pembangunan lebih banyak di pusat pemerintahan terutama Jawa.

Sejak tanggal 1 Januari 2001, Indonesia melakukan perubahan di bidang pemerintahan dengan memberlakukan sistem desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi ini berarti terdapat pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan publik yang sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki masing-masing. Melalui desentralisasi atau biasa disebut dengan istilah otonomi daerah ini diharapkan daerah mampu mengembangkan daerahnya supaya lebih maju dan yang juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya di daerah tersebut, agar setiap kebijakan yang akan diambil, khususnya mengenai pembangunan daerah tidak akan mengalami hambatan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta pun berlomba-lomba untuk membangun daerahnya agar jauh lebih baik lagi, dengan harapan seluruh masyarakat di masing-masing daerah tersebut dapat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang

berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan antara satu daerah yang maju dengan daerah lainnya yang tertinggal dalam segala bidang.

Gambar 1.1
Ratio Gini Provinsi di Indonesia Tahun 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2013

Selain dapat dilihat dari pembangunan yang terpusat di kotakota besar. Ketimpangan pendapatan bisa dilihat melalui Indeks Gini atau Koefisien Gini. Indeks gini merupakan salah satu yang dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara

menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini tahun 2013 menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata di provinsi-provinsi di Pulau Sumatra. Sedangkan, provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi memiliki distribusi pendapatan yang relatif timpang. Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota negara juga memiliki distribusi pendapatan yang relatif lebih timpang dibandingkan provinsi-provinsi lainnya dengan angka koefisien gini 0,43. Dengan masalah ketimpangan pendapatan yang tinggi di DKI Jakarta, maka peneliti menjadikan provinsi DKI Jakarta sebagai unit observasi.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa. Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terdiri atas 1 Kabupaten Administratif dan 5 Kota yaitu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Kota Jakarta Utara.

Menurut Sukirno (2004), salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu

sendiri. Perekonomian pada suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi.¹ Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui PDRB dan PDRB per kapita. Menurut BPS, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam membangun masing-masing daerah atau wilayahnya tentu berbeda-beda, mengingat potensi yang dimiliki tiap daerah berbeda-beda pula. Daerah yang memiliki potensi lebih besar cenderung memiliki pendapatan daerah yang lebih besar pula, dan begitu sebaliknya. Begitu pula yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta contohnya pada tahun 2009-2013, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 PDRB Kota Jakarta Pusat berada jauh melesat lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DKI Jakarta dari tahun ke tahun, yakni hingga mencapai nominal Rp. 124.998.663.000.000,- pada tahun 2013. Kemudian pada peringkat kedua, yaitu Kota Jakarta Selatan memiliki PDRB tertinggi dengan angka Rp. 107.507.547.000.000,- pada tahun 2013. Tidak heran apabila kedua kota tersebut memiliki PDRB tertinggi di DKI Jakarta, karena perekonomian di kedua wilayah tersebut didorong oleh sektor tersier (Sektor Perdagangan, Sektor Pengangkutan, Sektor Keuangan, dan Sektor Jasa-Jasa) yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian Jakarta. Di posisi ketiga dengan perolehan PDRB tertinggi

¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: YKPN, 2006) p.151

ditempati oleh Kota Jakarta Utara yang didominasi oleh sektor sekunder (Sektor Industri, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, dan Sektor Konstruksi) dan apabila ditinjau dari kontribusi sektoral, perekonomian Jakarta masih didominasi oleh sektor tersier. Akan tetapi, dibalik tingginya PDRB di Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Selatan dengan sektor tersier dan Di Kota Jakarta Utara dengan sektor sekunder, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki PDRB terendah, yakni hanya memiliki Rp. 1.172.740.000.000,-. Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang hanya didominasi oleh sektor pertambangan minyak ini pun ternyata memiliki PDRB terendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, dimana hal ini bisa disebabkan oleh Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu masih tergolong yang mengandalkan sektor primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan),. Keadaan ini pun sungguh berbanding terbalik, dan memiliki selisih nominal yang cukup jauh dan berlangsung selama tiga belas tahun terakhir sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal. Hal ini pun menggambarkan bahwa masih begitu tingginya kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi DKI Jakarta, walaupun telah diberlakukannya Desentralisasi.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
menurut Kabupaten/Kota Adm, 2009-2013 di DKI Jakarta (Juta
Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota Administrasi	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kepulauan Seribu	1,095,913	1,118,183	1,168,775	1,169,989	1,172,740
2	Jakarta Selatan	83,218,186	88,671,103	94,851,752	101,196,366	107,507,547
3	Jakarta Timur	62,913,134	66,725,673	70,918,146	75,528,790	80,117,815
4	Jakarta Pusat	96,477,154	102,859,738	110,003,339	117,440,570	124,998,633
5	Jakarta Barat	55,362,176	58,725,093	62,397,480	66,385,204	70,525,438
6	Jakarta Utara	69,218,053	73,383,111	78,046,749	82,763,871	87,560,331

Sumber :BPS Provinsi DKI Jakarta, 2015

Berbeda dengan PDRB, jika meninjau dari sisi PDRB perkapita maka posisi PDRB perkapita terbesar pertama adalah Kota Jakarta pusat yang diikuti oleh kabupaten administratif Kepulauan Seribu di posisi kedua yang dapat dilihat di table 1.2. PDRB perkapita adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Pada tahun 2013, Berdasarkan PDRB per kapita harga Berlaku dengan migas wilayah dengan PDRB per Kapita tertinggi adalah Kota Jakarta Pusat dengan nilai Rp 370,93 juta. Setelah itu diikuti oleh Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu sebesar Rp 264,64 juta rupiah.

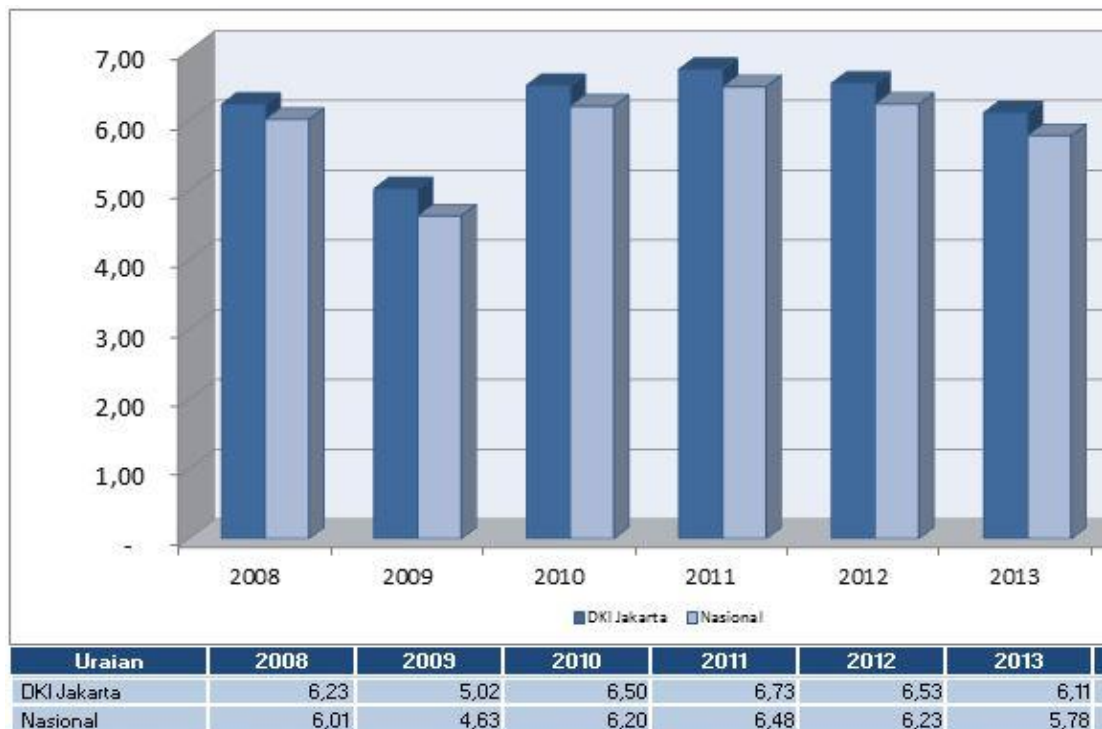
Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku menurut Kabupaten/Kota Adm, 2009-2013 di DKI Jakarta
(Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota Administrasi	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kepulauan Seribu	167,792,638	189,631,497	244,415,995	250,532,590	264,642,510
2	Jakarta Selatan	83,154,007	91,698,639	103,271,077	115,294,216	128,516,762
3	Jakarta Timur	53,226,128	54,392,123	60,647,696	67,472,708	75,927,695
4	Jakarta Pusat	222,773,838	254,049,124	288,861,139	324,043,680	370,930,889
5	Jakarta Barat	50,542,373	56,070,757	62,428,437	69,015,736	77,617,843
6	Jakarta Utara	87,042,864	97,542,838	110,166,308	122,645,636	137,935,003

Sumber :BPS Provinsi DKI Jakarta, 2015

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan adalah pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Namun di dalam pembangunan ekonomi selalu muncul polemik dalam menentukan strategi dasar pembangunannya, yaitu memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa prioritas pada laju pertumbuhan ekonomi tinggi sudah tidak dapat lagi dipakai untuk mengurangi kemiskinan atau orang yang berpendapatan rendah, sementara kemiskinan merupakan realita dalam kehidupan ekonomi di Negara yang sedang berkembang. Sebaliknya, di negara yang maju semangat untuk meningkatkan pendapatan merupakan tujuan yang paling penting dari segala kegiatan ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah memang tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tetap dianggap merupakan strategi yang unggul dalam pembangunan ekonomi.

Gambar 1.2
Statistik Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2015

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Selain itu pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Selama proses awal pembangunan, terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. Trade off atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing - masing daerah selalu

terjadi. Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) telah mengemukakan bahwa pada tahap - tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis “U - terbalik” Kuznets. Oleh karena itu pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dibandingkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri sehingga akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting bagi pembangunan. Di Negara maju, perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor pendidikan sangatlah besar, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan secara nyata akan mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial

Tabel 1.3
APK SMA Pulau Jawa Tahun 2004-2008 (persen)

Propinsi	2004	2005	2006	2007	2008
DKI Jakarta	77,63	73,28	68,95	68,74	65,58
Jawa Barat	46,42	46,27	51,07	49,32	48,73
Banten	49,56	53,55	50,16	54,29	53,44
Jawa Tengah	52,69	55,20	54,54	56,91	58,72
DI Yogyakarta	77,48	78,05	72,57	75,87	79,04
Jawa Timur	53,77	56,46	58,14	64,17	63,68

Sumber : BPS-RI, Susenas 2003-2009

Tabel 1.3 menggambarkan angka partisipasi kasar sebagai indikator pendidikan, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan

sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan di Propinsi DKI Jakarta dari tahun 2004-2008 terus mengalami penurunan, namun penurunannya tidak terlalu besar.

Semakin meratanya jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat pendidikan yang tinggi (SMA dan Perguruan Tinggi), maka akan semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di suatu daerah.

Faktor lainnya yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yaitu pengangguran. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu Negara (Tambunan, 2001). Di DKI Jakarta besarnya tingkat pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2008 dari 580 ribu orang menjadi 467 ribu orang pada tahun 2013 yang dapat dilihat di gambar 1.3.

Gambar 1.3



Sumber : Bappeda DKI Jakarta

Jika diteliti lebih dalam, banyak hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan menurut Anneli Kaasa dalam jurna yang berjudul *Factors of Income Inequality and Their Influence Mechanisms: A Theoretical Overview*, membagi ke dalam lima kelompok factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan, yaitu pertama faktor ekonomi pembangunan yang terdiri dari kesejahteraan Negara, struktur pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan teknologi. Kedua faktor demografi yang terdiri dari urbanisasi, komposisi rumah tangga, tingkat pendidikan, ketimpangan pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Ketiga faktor politik yaitu demokrasi dan bagian sektor pemerintah,

keempat faktor lingkungan dan budaya yang terdiri dari konsentrasi tanah, variasi budaya, bayangan ekonomi, korupsi, eksplorasi sumber daya alam. Dan Faktor yang terakhir yaitu faktor makro ekonomi yang terdiri dari inflasi, pengangguran, keuangan pembangunan, ekspor-impor, dan investasi asing.

Dari semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tiga faktor yang menurut peneliti penting, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, maka dikemukakan identifikasi masalah yang dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan?
4. Apakah terdapat pengaruh antara pembangunan teknologi terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan?
5. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat inflasi terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan?

6. Apakah terdapat pengaruh antara investasi asing terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah yang timbul dan hal ini tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas semua masalah di dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada masalah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, peneliti merumuskan di dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan?”.

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran serta pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga penelitian

ini dapat digunakan sebagai instrument evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran kaitannya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.